

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan). *Tomalebbi Fakultas Ilmu Sosial*, 2(1), 95–102.
- Boentor. (2017). Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri. *Ilmu Hukum*, 4(1), 1–15.
- Enggal, Ayoganata, C. (2015). Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Dki Jakarta Tahun 2014-2015. *Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1–15.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68–73. Retrieved from <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496>
- Kusuma, Amalia, A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Ilmu Sosial*, 3(1), 64–71. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/65>
- 84
- Machmud, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan. *Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48.

- Rahmaturyadi, I. (2015). Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan. *Ilmu Hukum*.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (D. Sumayyah, Ed.) (4th ed.). Bandung: PT.Refika Aditama.
- Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andreas, P., Made, N., & Nyoman, W. I. (2017). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, *18*(35), 269–275.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. (E. Soetari, Ed.) (1st ed.). Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Mukarom, Z., & Laksana wijaya, M. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Governance*. (B. Saebani Ahmad, Ed.) (1st ed.). Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (H. Gedeona, Ed.) (2nd ed.). Bandung: Cv. Alfabeta.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. (Octiviena, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (kedua). Bandung: Alfabeta, cv.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, Cv.

Suharto, E. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. *Kawistara*, 5(1), 1–98.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

T. Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (2nd ed.). Yogyakarta: Gava Media.

Tribun Batam. (2018). Kasus Kekerasan Anak Mendominasi Batam.

Wijaya, A., & Ananta Peace, W. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. (M. Sari, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Yarrini, S. D. (2014). Peran negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. *Ilmu Politik*, 4(2).

Zainal Abidin, S. (2012). *Kebijakan Publik*. (M. Masykur, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.

Zulwisman, & Firdaus, E. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau. *Ilmu Hukum*, 1(1).

Peraturan dan Kebijakan

Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 tahun 2002.